



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 6171-6179

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Analisis Konseptual dalam Konteks Perkembangan Financial Technology

Nadila Aprilianti¹, Bunga Lestari², Mutia Rahayu³, Musdalifah⁴, Muhammad Ridho Alfarisi⁵, Khaisa Kayana⁶,
Junita Sari Br Sitorus⁷, Elisa Goretti Sitio⁸, Surya Juliandri⁹

¹⁻⁹ Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau

¹nadila.aprilianti1125@student.unri.ac.id, ²bunga.lestari2117@student.unri.ac.id,

³mutia.rahayu3848@student.unri.ac.id, ⁴musdalifah0185@student.unri.ac.id,

⁵muhhammad.ridho2252@student.unri.ac.id, ⁶khaisa.kayana1983@student.unri.ac.id,

⁷junita.sari1755@student.unri.ac.id, ⁸elisa.goretti2887@student.unri.ac.id, ⁹surya.juliandri2478@student.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan di Indonesia melalui pendekatan analisis konseptual dan tinjauan literatur sistematis. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74% (metode DNKI), sementara indeks literasi keuangan hanya sebesar 66,64%, menghasilkan gap sebesar 26,10 poin persentase. Kesenjangan ini paling tajam pada kelompok usia 15–17 tahun dengan selisih mencapai 22,32 poin yang mengindikasikan bahwa penetrasi layanan keuangan digital telah melampaui kapasitas pemahaman penggunaannya. Artikel ini menjelaskan fenomena tersebut melalui empat kerangka teoritis: *Technology Acceptance Model (TAM)*, *Theory of Planned Behavior (TPB)*, *Financial Socialization Theory*, dan *Human Capital Theory*. Temuan konseptual menunjukkan bahwa perkembangan *financial technology* (*fintech*) berperan sebagai amplifikasi kesenjangan karena desain platform yang mengutamakan kemudahan akses di atas pemahaman pengguna, sementara infrastruktur literasi keuangan melalui pendidikan formal dan sosialisasi komunitas belum berkembang secara sebanding. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko pengambilan keputusan keuangan yang kurang tepat serta memperbesar kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaan layanan keuangan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya mempersempit gap memerlukan intervensi terpadu: integrasi edukasi keuangan dalam kurikulum formal, regulasi yang mewajibkan platform *fintech* mengintegrasikan fitur literasi, penguatan perlindungan konsumen digital, serta kolaborasi lintas sektor yang menjangkau hingga tingkat desa guna menciptakan masyarakat yang tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan memahami serta memanfaatkannya secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Financial Technology, Kesenjangan Finansial, SNLIK 2025, Indonesia.

1. Latar Belakang

Di tengah arus perkembangan global yang semakin maju, sektor ekonomi merupakan salah satu dari banyaknya sektor yang terkena dampak. Sektor ekonomi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut didukung oleh tingkat inklusi keuangan di Indonesia yang tinggi. Namun, peningkatan inklusi keuangan tersebut tidak sebanding dengan tingkat literasi keuangan di Indonesia yang masih tergolong rendah. Artinya, banyak individu yang telah memiliki akses terhadap layanan keuangan tetapi belum mampu untuk menggunakannya secara optimal.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024 tingkat inklusi keuangan di Indonesia sebesar 75,02% lalu pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan menjadi 80,51% dengan metode keberlanjutan dan 92,54% dengan metode cakupan DNKI. Kondisi ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan layanan keuangan berbasis *financial technology* (*fintech*). Namun peningkatan tersebut tidak seimbang dengan

Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia: Analisis Konseptual dalam Konteks Perkembangan
Financial Technology

tingkat literasi masyarakat. OJK mencatat, literasi keuangan di Indonesia sebesar 65,43% pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan marginal menjadi 66,46% dengan metode keberlanjutan dan 66,64% dengan metode cakupan DNKI.

Di sisi lain, meningkatnya laju perubahan teknologi finansial di Indonesia menciptakan paradoks baru dalam lanskap keuangan nasional. Bank Indonesia melaporkan bahwa hingga Semester I tahun 2025, QRIS telah menjangkau sekitar 57 juta pengguna dan 39,3 juta *merchant*, yang 93,16% di antaranya adalah UMKM. Total transaksi mencapai 6,05 miliar transaksi senilai Rp579 triliun. Perkembangan tersebut menandakan bahwa tingkat penetrasi teknologi finansial dalam aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia semakin tinggi yang berdampak pada penguatan peran digitalisasi dalam mendukung inklusi keuangan nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga menegaskan bahwa QRIS diarahkan sebagai entry point menuju ekosistem digital bagi UMKM guna mendorong inklusi ekonomi dan keuangan.

Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi finansial yang sangat cepat juga menghadirkan tantangan baru dalam sektor keuangan digital, mulai dari penyalahgunaan layanan pinjaman daring, keamanan data, hingga meningkatnya potensi penipuan digital. Situasi tersebut menjelaskan bahwa perkembangan fintech tidak hanya memperluas akses dan inklusi keuangan, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan dengan literasi keuangan apabila tidak diimbangi dengan edukasi dan pemahaman digital yang memadai. Oleh karena itu, dimensi teknologi finansial menjadi variabel penting yang tidak dapat diabaikan dalam menganalisis akar permasalahan kesenjangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia pada era ekonomi digital saat ini.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah literasi dan inklusi keuangan, namun sebagian besar mengkajinya secara terpisah atau hanya menekankan hubungan positif di antara keduanya tanpa menganalisis secara mendalam ketidaksesuaian (*mismatch*) yang terjadi di lapangan. Kajian yang secara khusus menganalisis gap antara keduanya dalam konteks akselerasi teknologi digital di Indonesia masih relatif terbatas.

2. Tinjauan Pustaka

Literasi keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengevaluasi, dan menerapkan informasi keuangan untuk mengambil keputusan yang efektif demi kesejahteraan finansial jangka panjang (Laturette *et al.*, 2021). Kemampuan ini mencakup pemahaman terhadap produk keuangan, pengelolaan pendapatan, perencanaan keuangan, serta pemahaman atas risiko investasi.

Inklusi keuangan

Inklusi keuangan, sebagaimana didefinisikan oleh *World Bank* dan *European Commission*, merupakan upaya menghilangkan hambatan, baik harga maupun non-harga dalam akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal (Nindy & Sulhan, 2021). OJK (2017) mendefinisikannya sebagai ketersediaan akses terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat, termasuk tabungan, kredit, pembayaran, dan asuransi, baik melalui jalur formal maupun digital (Kusuma *et al.*, 2021).

Technology Acceptance Model (TAM)

TAM yang dikembangkan oleh Fred Davis (1989) menggambarkan suatu individu dapat menerima dan menggunakan teknologi berdasarkan dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kemanfaatan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks *fintech*, model ini menerangkan mengapa layanan seperti dompet digital, QRIS, dan *paylater* dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat tanpa terlebih dahulu memahami mekanisme, biaya, dan risiko yang melekat pada produk tersebut. TAM mampu menjelaskan mengapa inklusi keuangan dapat meningkat pesat secara teknologis tanpa diikuti peningkatan literasi yang proporsional, karena kemudahan akses tidak mensyaratkan pemahaman mendalam sebagai prasyarat penggunaan.

Theory of Planned Behavior (TPB)

TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Teori ini menjelaskan mengapa ketersediaan akses layanan keuangan tidak serta-merta menghasilkan perilaku keuangan yang bijak. Seseorang dengan akses penuh terhadap layanan keuangan digital tetap dapat berperilaku tidak bijak secara finansial apabila sikapnya terhadap pengelolaan

keuangan buruk, norma sosialnya tidak mendukung perilaku menabung atau berinvestasi, dan kontrol dirinya rendah.

Financial Socialization Theory

Financial Socialization Theory yang dikembangkan oleh Danes (1994) menyatakan bahwa pemahaman dan perilaku keuangan seseorang dibentuk melalui proses sosialisasi sejak masa kanak-kanak, dengan agen sosialisasi utama meliputi keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, dan media. Teori ini menjelaskan bahwa kesenjangan literasi keuangan cenderung bersifat struktural dan lintas generasi. Individu yang tumbuh dalam lingkungan keluarga tanpa kebiasaan menabung atau mendiskusikan keuangan secara terbuka akan memiliki fondasi literasi yang lemah, meskipun kelak mendapatkan akses penuh terhadap layanan keuangan digital (Shim *et al.*, 2010). Data SNLIK 2025 yang menunjukkan gap terbesar pada kelompok usia 15-17 tahun (22,32 poin) menjadi konfirmasi empiris dari prediksi teoritis ini.

Human Capital Theory

Human Capital Theory yang dikembangkan oleh Becker (1964) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan investasi dalam diri manusia yang meningkatkan produktivitas, kapasitas kognitif, dan kemampuan pengambilan keputusan. Dalam konteks literasi keuangan, teori ini menjelaskan mengapa tingkat pendidikan formal berkorelasi positif dengan kemampuan memahami dan mengelola produk keuangan. Individu dengan modal manusia yang lebih tinggi cenderung mampu menjembatani gap antara akses dan pemahaman keuangan secara lebih efektif, sementara kelompok dengan modal manusia rendah terjebak dalam kondisi *financially included but not financially capable*.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan keempat teori di atas, kesenjangan literasi-inklusi keuangan di Indonesia dapat dipahami sebagai produk dari dua kekuatan yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Di satu sisi, ekspansi fintech mendorong percepatan inklusi keuangan melalui mekanisme kemudahan akses (TAM). Di sisi lain, peningkatan literasi bergerak lebih lambat karena bergantung pada proses sosialisasi keuangan jangka panjang (*Financial Socialization Theory*) dan akumulasi modal manusia melalui pendidikan formal (*Human Capital Theory*). Dampaknya adalah munculnya populasi pengguna layanan keuangan yang besar secara kuantitatif, namun rentan secara finansial karena tidak memiliki sikap, norma, dan kontrol perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang bijak, sebagaimana diprediksikan oleh TPB. Kondisi ini diperparah oleh faktor-faktor struktural seperti rendahnya pendidikan dan pendapatan pada segmen masyarakat tertentu.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sufyati & Lestari (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, dan gaya hidup secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan generasi milenial di Jakarta selatan, dengan kontribusi literasi keuangan yang dominan. Sementara itu, penelitian menyebutkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan pengembangan properti di Gowa, namun sikap keuangan justru tidak terbukti signifikan, sehingga menunjukkan bahwa aspek kognitif lebih dominan dibandingkan aspek afektif dalam konteks bisnis properti (Jamali *et al.*, 2023).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik (2025) dalam buku Statistik Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 menyoroti secara eksplisit adanya Gap antara Indeks literasi dan inklusi keuangan nasional (gap mencapai 14,05 poin pada metode keberlanjutan dan 26,1 poin pada metode DNKI) serta implikasinya terhadap perilaku keuangan masyarakat, khususnya di era pesatnya perkembangan fintech. Penelitian ini menekankan bahwa masyarakat cenderung sudah terinklusi (memiliki akses dan menggunakan produk keuangan) namun belum terintegrasi dengan baik, sehingga berisiko tinggi mengambil keputusan keuangan yang tidak bijak. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini bersifat makro-nasional dengan survei berskala besar berbeda dengan penelitian sebelumnya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis konseptual untuk mengidentifikasi kesenjangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia secara intensif. Pendekatan ini dipilih untuk membentuk pemahaman terstruktur melalui perpaduan literatur yang relevan tanpa adanya proses pengumpulan data primer secara langsung.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah bersifat sekunder, berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga pemerintah, serta publikasi akademik lainnya. Berbasis pada data yang berpacu pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari Analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), serta jurnal-jurnal ilmiah terkini yang membahas topik yang relevan.

Alur analisis data pada artikel ini dilakukan dengan tiga tahapan yang terstruktur. **Pertama**, identifikasi dan pemilihan kriteria sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. **Kedua**, dilakukan pemetaan konseptual berdasarkan temuan-temuan yang telah dikumpulkan. **Ketiga**, kombinasi konsep untuk menemukan pola, hubungan, serta celah yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dari perpaduan tersebut menjadi inti untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai mengapa literasi keuangan masih rendah meskipun akses terhadap layanan keuangan sudah semakin terjangkau di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

SNLIK 2025 (OJK & BPS, 2025) menunjukkan gambaran yang jelas mengenai ketimpangan antara literasi dan inklusi keuangan nasional. Dengan metode cakupan DNKI yang mengikutsertakan kepesertaan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, lembaga keuangan non-bank, dan infrastruktur digital sebagai indikator inklusi memiliki indeks inklusi keuangan mencapai 92,74%. Sebaliknya, indeks literasi keuangan hanya sebesar 66,64%, menghasilkan gap sebesar 26,10 poin persentase. Dengan metode keberlanjutan yang lebih ketat, gap tetap signifikan yaitu 14,05 poin (inklusi 80,51% vs. literasi 66,46%).

Tabel 1. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan per Kelompok Umur (SNLIK 2025)

Kelompok Umur	Literasi (%)	Inklusi (%)	Gap (point)
15–17 tahun	51,68	74,00	22,32
18–25 tahun	73,22	89,96	16,74
26–35 tahun	74,04	86,10	12,06
36–50 tahun	72,05	85,81	13,76
51–79 tahun	54,55	66,88	12,33
Rata-rata nasional	66,64	92,74	26,10

Sumber: OJK & BPS, SNLIK 2025 (metode Keberlanjutan)

Pola data ini mengungkap dua temuan kritis. Pertama, gap terbesar terjadi pada kelompok usia 15-17 tahun (22,32 poin), yang jauh melampaui rata-rata kelompok usia dewasa aktif. Hal ini menunjukkan bahwa penetrasi layanan keuangan digital pada generasi muda telah melampaui kapasitas pemahaman mereka terhadap produk dan risiko keuangan. Kedua, kelompok usia produktif (18-50 tahun) memiliki literasi yang relatif lebih tinggi, namun gap dengan inklusi tetap signifikan karena tingkat inklusi kelompok ini juga sangat tinggi.

Tingginya adopsi layanan keuangan digital juga tecermin dari data penetrasi internet. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2025 telah menembus 80% dengan sekitar 229,43 juta penduduk dari total populasi 284,44 juta yang terkoneksi. Dilengkapi juga dengan data kesenjangan gender dan antarpulau yang menunjukkan penetrasi laki-laki 82,73% vs. perempuan 78,57%, dan Jawa memimpin dengan 84,69%. Data tersebut menunjukkan bahwa akses bukan satu-satunya masalah, melainkan kualitas literasi yang harus lebih ditingkatkan lagi.

Faktor Penyebab Kesenjangan

a. Akselerasi Teknologi Melampaui Kapasitas Literasi

Kemunculan produk fintech seperti *e-wallet*, *mobile banking*, QRIS, dan layanan *paylater* membuat akses terhadap layanan keuangan menjadi luas dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan teori TAM (Davis, 1989), masyarakat mengadopsi layanan ini karena kemudahan penggunaan dan persepsi kemanfaatannya secara praktis, bukan karena pemahaman mendalam terhadap mekanisme biaya, bunga, atau risiko yang melekat. Hasilnya, inklusi keuangan melonjak, sementara literasi yang memerlukan proses pembelajaran lebih panjang tidak mampu mengimbangi kecepatan ini.

b. Lemahnya Sosialisasi Keuangan Sejak Dini

Sesuai *Financial Socialization Theory* (Danes, 1994), kemampuan mengelola keuangan dibentuk melalui proses pembelajaran jangka panjang dalam keluarga dan lingkungan pendidikan. Banyak keluarga di Indonesia tidak memiliki kebiasaan mendiskusikan keuangan secara terbuka, tidak mengenalkan konsep menabung dan berinvestasi sejak dini, sehingga generasi muda memasuki ekosistem keuangan digital tanpa fondasi literasi yang memadai (Shim *et al.*, 2010). Hal ini tercermin dari rendahnya indeks literasi kelompok usia 15-17 tahun sebesar 51,68% dibanding kelompok yang lebih tua.

c. Kesenjangan Pendidikan dan Pendapatan

Human Capital Theory (Becker, 1964) menegaskan bahwa tingkat pendidikan formal berkorelasi positif dengan kemampuan memahami dan mengelola produk keuangan. Namun, pendidikan formal di Indonesia belum secara sistematis mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam kurikulumnya. Di sisi lain, masyarakat berpendapatan rendah cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dibanding perencanaan keuangan jangka panjang, sehingga gap literasi-inklusi cenderung lebih tajam pada kelompok rentan ini (Fitari & Hafiz, 2026).

d. Faktor Geografis

Kondisi geografis Indonesia yang luas menyebabkan disparitas akses informasi dan layanan keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat perkotaan memiliki akses internet, fasilitas pendidikan, dan layanan keuangan yang lebih baik, sementara daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur yang menghambat baik inklusi maupun literasi.

e. Pengaruh Sosial dan Budaya Konsumtif

Sesuai TPB (Ajzen, 1991), norma subjektif berperan besar dalam membentuk perilaku keuangan. Ketika penggunaan *paylater* atau pinjaman online menjadi lazim di lingkungan sosial seseorang, perilaku tersebut dianggap normal meskipun tidak sesuai dengan kapasitas finansial individu tersebut. Media sosial turut memperkuat budaya konsumtif seperti promo *cashback*, diskon besar, dan tren gaya hidup modern mendorong pembelian impulsif yang mengabaikan kondisi keuangan jangka panjang, terutama di kalangan generasi muda.

Dampak Kesenjangan terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat

Kesenjangan literasi-inklusi yang mencapai 26,10 poin persentase menimbulkan beberapa dampak negatif yang signifikan. Pertama, meningkatnya kerentanan terhadap produk keuangan berisiko tinggi. Banyak masyarakat menggunakan layanan *paylater* dan pinjaman online tanpa mempertimbangkan risiko dan kemampuan finansial mereka, yang berujung pada masalah utang dan kesulitan mengatur keuangan pribadi. OJK (2024) mencatat bahwa peningkatan penggunaan layanan pinjaman digital diikuti oleh peningkatan kasus gagal bayar, terutama pada segmen berpenghasilan rendah dan generasi muda. Kedua, rentan terhadap penipuan keuangan. Rendahnya pemahaman tentang mekanisme produk keuangan membuat masyarakat lebih mudah tertipu oleh investasi bodong dan penipuan digital, yang makin masif seiring meluasnya akses internet. Ketiga, perilaku konsumtif yang tidak terencana. Kemudahan transaksi digital, dikombinasikan dengan rendahnya literasi, mendorong perilaku pembelian impulsif yang mengorbankan tabungan dan perencanaan keuangan jangka panjang.

Di sisi lain, inklusi keuangan yang tinggi juga memberikan manfaat riil bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani perbankan formal kini memiliki akses terhadap tabungan, modal usaha, dan sistem pembayaran yang lebih efisien. Ferdi, Amri & Zaenal (2022) membuktikan bahwa literasi dan inklusi keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Artinya, manfaat inklusi baru dapat dioptimalkan apabila dibarengi peningkatan literasi yang memadai.

Yulandari dan Astuti (2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan secara signifikan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami manfaat, risiko, serta cara penggunaan layanan fintech secara lebih bijak dan aman. Ini mempertegas bahwa literasi adalah kunci untuk mengkonversi akses keuangan menjadi kesejahteraan finansial yang nyata.

Gap sebesar 26,10% ini juga menciptakan implikasi kebijakan yang kritis. Target RPJMN 2025-2029 (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025) menetapkan literasi keuangan 69,35% dan inklusi keuangan 93% pada tahun 2029. Jika laju pertumbuhan inklusi terus melampaui literasi seperti saat ini, gap akan semakin melebar dan menciptakan populasi yang besar namun rentan secara finansial.

Peran Fintech: Amplifier atau Equalizer Kesenjangan?

a. Fintech sebagai Amplifier Kesenjangan

Dalam kondisi Indonesia saat ini, fintech cenderung berfungsi sebagai amplifier kesenjangan. Pertama, laju pertumbuhan inklusi yang dipicu fintech jauh melampaui laju pertumbuhan literasi (gap 26,10 poin). Desain antarmuka yang intuitif dan insentif berupa *cashback* membuat jutaan pengguna mengadopsi QRIS, *e-wallet*, dan *paylater* tanpa memahami mekanisme biaya, bunga, dan risiko yang melekat. Situasi tersebut sejalan dengan prediksi TAM (Davis, 1989).

Kedua, sebagian besar platform fintech komersial saat ini lebih berorientasi pada akuisisi pengguna (*growth-first*) daripada peningkatan kapasitas finansial pengguna, sebagai konsekuensi dari model bisnis berbasis pertumbuhan pengguna aktif.

Ketiga, infrastruktur ekosistem literasi yang seharusnya menjadi penyangga seperti pendidikan keuangan di sekolah, program edukasi berbasis komunitas, dan regulasi perlindungan konsumen yang kuat. Namun, faktanya infrastruktur tersebut belum berkembang secara sebanding dengan ekspansi fintech.

Meluasnya fintech tanpa diimbangi literasi yang memadai juga berpotensi membentuk norma sosial yang kontraproduktif. Ketika penggunaan *paylater* menjadi lazim dalam lingkungan sosial seseorang, norma subjektif yang terbentuk adalah bahwa perilaku tersebut normal dan dapat diterima, meskipun individu tidak memiliki kapasitas finansial yang cukup sebagaimana diprediksikan TPB (Ajzen, 1991).

b. Potensi Fintech sebagai Equalizer

Namun, fintech juga memiliki potensi signifikan untuk mempersempit gap apabila dirancang dengan orientasi edukatif. Beberapa platform telah mengintegrasikan fitur edukasi keuangan, seperti simulasi investasi, notifikasi pengeluaran otomatis, dan konten literasi yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku transaksi pengguna yang sejalan dengan *nudge theory* (Thaler & Sunstein, 2008).

Morgan dan Trinh (2019) dalam studinya di enam negara ASEAN menemukan korelasi positif antara penggunaan fintech dan peningkatan literasi keuangan pada populasi yang sebelumnya tidak terlayani perbankan formal (*unbanked population*), melalui mekanisme *learning by doing*: interaksi berulang dengan layanan keuangan digital secara bertahap membangun pemahaman intuitif tentang konsep keuangan dasar. Dengan demikian, fintech berpotensi menjadi media sosialisasi keuangan kontemporer yang melengkapi jalur tradisional melalui keluarga dan sekolah (Danes, 1994).

Fintech dapat bertransformasi menjadi instrumen penyempitan gap apabila tiga kondisi terpenuhi secara simultan: (1) regulasi yang mewajibkan platform fintech mengintegrasikan fitur edukasi keuangan yang substantif, bukan

sekadar konten dekoratif; (2) penguatan ekosistem literasi digital di luar platform fintech, khususnya di jalur pendidikan formal; serta (3) perubahan orientasi desain produk dari *growth-first* menjadi *literacy-integrated*, di mana kemudahan akses dan pemahaman pengguna dirancang sebagai satu kesatuan. Tanpa ketiga kondisi ini, percepatan inklusi berbasis fintech akan terus menghasilkan populasi yang *financially included but financially vulnerable*.

Strategi Mitigasi Kesenjangan

Berdasarkan analisis kesenjangan literasi dan inklusi keuangan yang telah dipaparkan, dibutuhkan solusi yang sistematis dan saling berkesinambungan untuk menutup gap sebesar 26,10% di Indonesia. Solusi yang dihadirkan meliputi lima langkah yang saling mendukung, diawali dengan penguatan edukasi, literasi digital, integrasi kurikulum, regulasi, hingga kerjasama semua pihak dan pendampingan langsung.

Langkah pertama adalah mengoptimalkan kualitas program edukasi keuangan supaya tidak terhenti pada tahap pemberian informasi, tetapi mampu mengalihkan pola pikir dan perilaku keuangan masyarakat Indonesia. Meluasnya akses layanan keuangan di Indonesia sejauh ini tidak secara langsung diikuti oleh pemahaman masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Salsabila & Kusmayadi (2025) menemukan bahwa keterbatasan literasi tetap terjadi meskipun akses layanan keuangan sudah tersedia, sementara penelitian Ernayani *et al.*, (2024) membuktikan bahwa edukasi yg telah yang telah diterapkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan finansial masyarakat mampu mendorong kemandirian secara efektif.

Langkah kedua, edukasi keuangan harus dihadirkan langsung di platform digital yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meluasnya akses layanan seperti QRIS, dompet digital dan paylater tidak diikuti dengan pemahaman penggunaan dalam memahami risikonya (Takdirmin *et al.*, 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan edukasi keuangan wajib menjangkau seluruh masyarakat pada ekosistem yang sama.

Langkah ketiga, materi literasi keuangan perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal sejak jenjang pendidikan dasar. Se jauh ini pemahaman keuangan hanya terbentuk dari kebiasaan yang diajarkan oleh keluarga yang ternyata tidak selalu tepat (Musadat, 2024). Dalam penelitian Fitri & Hafiz (2026) telah membuktikan bahwa tingkat pendidikan individu berpengaruh langsung terhadap ketimpangan antara literasi dan inklusi keuangan. Maka dari itu, tanpa penguatan sejak dini di sekolah formal, kesenjangan ini akan berlanjut ke generasi berikutnya.

Langkah keempat, perlindungan konsumen terhadap keuangan digital perlu dipertegas secara lebih serius. Maraknya korban penipuan, investasi bodong, dan pinjaman online secara ilegal karena tergiur dengan keuntungan yang besar secara cepat tanpa memahami risiko yang akan terjadi, situasi ini erat kaitannya dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat (Fitri *et al.*, 2024). Sementara OJK melalui POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan telah mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk mengedukasi konsumennya, namun implementasinya perlu diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat serta saluran pengaduan yang mudah diakses seluruh masyarakat.

Langkah kelima, keberhasilan keempat langkah di atas sangat ditentukan oleh kemauan semua pihak untuk bekerja sama secara nyata dan berkesinambungan. OJK bersama DNKI telah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku industri keuangan, akademisi, serta media dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia (OJK, 2024). Namun Aula *et al.*, (2026) menegaskan bahwa akses dan literasi yang meningkat tidak cukup tanpa pendampingan yang berkualitas. Oleh karena itu, kolaborasi ini harus diwujudkan dalam program-programnya hingga tingkat desa demi mencapai target RPJMN 2025–2029 secara seimbang antara inklusi dan literasi keuangan (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025).

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan di Indonesia merupakan fenomena yang serius dan struktural. Dengan gap mencapai 26,10 poin persentase (inklusi 92,74% vs. literasi 66,64% berdasarkan SNLIK 2025), Indonesia menghadapi situasi di mana jutaan masyarakat telah menggunakan produk keuangan tanpa memiliki pemahaman yang memadai tentang mekanisme, biaya, risiko, dan implikasi finansialnya.

Tiga kesimpulan utama dapat ditarik dari analisis ini: Pertama, akselerasi fintech adalah penyebab utama melebarnya gap. Kemudahan dan kecepatan adopsi teknologi finansial, yang difasilitasi oleh desain antarmuka yang intuitif (sebagaimana dijelaskan TAM), telah membawa jutaan pengguna baru ke dalam sistem keuangan formal. Namun, kecepatan adopsi ini melampaui kecepatan peningkatan literasi yang bergantung pada proses sosialisasi dan pendidikan jangka panjang. Kedua, kesenjangan ini bersifat struktural dan lintas generasi. Gap terbesar pada kelompok usia 15-17 tahun (22,32 poin) menunjukkan bahwa generasi yang tumbuh di era digital mengadopsi teknologi keuangan lebih cepat daripada mereka membangun pemahaman terhadapnya. Tanpa intervensi sistemik melalui pendidikan formal, pola ini akan berlanjut pada generasi berikutnya. Ketiga, fintech dalam kondisinya saat ini lebih berperan sebagai amplifier kesenjangan daripada *equalizer*-nya, karena orientasi *growth-first* yang mendominasi desain platform. Transformasinya menjadi *equalizer* membutuhkan perubahan regulasi, desain produk, dan ekosistem literasi secara simultan. Implikasi kebijakan yang paling mendesak adalah: (1) pengintegrasian literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan formal sejak jenjang dasar; (2) penguatan regulasi yang mewajibkan platform fintech menyertakan edukasi keuangan yang substantif; dan (3) memperkuat ekosistem perlindungan konsumen digital agar masyarakat yang sudah terinklusi tidak menjadi korban dari kurangnya pemahaman mereka sendiri.

Referensi

1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
2. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2025). *Laporan Survei Internet Indonesia 2025*. Jakarta: APJII.
3. Aula, A. D., Wulandari, H. K., Kharisma, A. S., & Dumadi. (2026). Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, dan Payment Gateway Terhadap Pengelolaan Keuangan Kecamatan Wanasari. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Vol.*, 2(3), 598–609.
4. Azikin, N., Goso, G., Sahrir, S., & Hamid, R. S. (2023). Analisis dampak pendapatan, lama usaha, usia terhadap literasi keuangan pelaku UMKM. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(3), 2486–2495. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1405>
5. Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik telekomunikasi Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html>
6. Bank Indonesia. (2024). Laporan ekonomi dan keuangan digital Indonesia 2024. <https://www.bi.go.id>
7. Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
8. Danes, S. M. (1994). Parental perceptions of children's financial socialization. *Financial Counseling and Planning*, 5, 127–149.
9. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
10. Ernayani, R., Zulaecha, H. E., Rachmania, D., Alfiana, A., & Hakim, M. Z. (2024). Edukasi Literasi Keuangan bagi Masyarakat: Membangun Kemandirian Finansial. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 1713–1722. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.4797>
11. Febriana, S. N., & Sulhan, M. (2021). Pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM pada masa pandemi Covid-19 (Studi kasus pada UMKM Kabupaten Malang). *Competitive*, 16(2), 59–69.
12. Ferdi, M., Amri, M., & Zaenal, M. (2022). Literasi dan inklusi keuangan dalam perekonomian Indonesia: Suatu aplikasi panel data. *Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial*, 1(2), 51–70. <https://doi.org/10.56313/jeds.v1i2.145>
13. Fitri, T., & Hafiz, A. (2026). Analisis Gap antara Literasi dan Inklusi Keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 10(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v10i1.19158>
14. Fitri, V. Y., Masyhuri, M., & Muda, Y. (2024). Investasi Bodong dan Pinjaman online Ilegal: Jeratan manipulasi Psikologis. *Journal of Education Research*, 5(4), 4944–4951. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1270>
15. Gudmunson, C. G., & Danes, S. M. (2011). Family financial socialization: Theory and critical review. *Journal of Family and Economic Issues*, 32(4), 644–667. <https://doi.org/10.1007/s10834-011-9275-y>
16. Indonesia, R. (2022). *Peraturan OJK No.16 Tahun 2022*. 19. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227355/peraturan-ojk-no-6poj072022-tahun-2022>
17. Jamali, H., Haeruddin, H., & Ahmad, I. (2023). Dampak literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku keuangan. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(02), 105–116. <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i2.1277>
18. Kusuma, M., Narulitasari, D., & Nurohman, Y. A. (2021). Inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM di Solo Raya. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 62–76.
19. Laturette, K., Widianingsih, L. P., & Subandi, L. (2021). Literasi keuangan pada generasi Z. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(1), 131–139.
20. Morgan, P. J., & Trinh, L. Q. (2019). *Fintech and financial literacy in the Lao PDR* (ADB Working Paper No. 984). Asian Development Bank Institute. <https://doi.org/10.22617/WPS190635-2>
21. Musadat, I. A. (2024). Bijak Berkeuangan Di Usia Muda Program Literasi Keuangan Siswa MA Tunggilis Kab . Pangandaran. *In Search (Informatic, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism)*, 23(2), 54–58.
22. OECD. (2025). OECD International Network on Financial Education What is financial literacy? Why join the INFE? *OECD Publishing*.
23. OJK, & BPS. (2024). *SURVEI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN (SNLIK)*.
24. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). OECD/INFE 2023 international survey of adult financial literacy (OECD Business and Finance Policy Papers No. 39). *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/56003a32-en>
25. Otoritas Jasa Keuangan. (2022, 22 November). *Siaran pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>
26. Otoritas Jasa Keuangan. (2025, 2 Mei). *Siaran pers bersama: Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat, OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Siaran-pers-bersama-Indeks-literasi-dan-inklusi-keuangan-masyarakat-meningkat-OJK-dan-BPS-umumkan-hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025>

<kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>

27. Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 10 Maret). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025*. <https://ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/Perilaku-Pelaku-Usaha-Jasa-Kuangan/SNLIK/Pages/SNLIK-2025.aspx>
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638>
29. Salsabila, C. S., & Kusmayadi, D. (2025). Analisis Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Usaha Kerudung "Arey Hijab". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.A), 24-45.
30. Shim, S., Barber, B. L., Card, N. A., Xiao, J. J., & Serido, J. (2010). Financial socialization of first-year college students: The roles of parents, work, and education. *Journal of Youth and Adolescence*, 39(12), 1457-1470. <https://doi.org/10.1007/s10964-009-9432-x>
31. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
32. Sufyati H. S., & Lestari, A. (2022). Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan pada generasi milenial. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(5), 2415–2430. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.396>
33. Takdirmin, T., Ramadhani, F., Ramadhani, I., Nurfadilah, N., & Dwiastya, V. (2025). Keuangan Digital dan Fintech : Inovasi, Dampak, dan Tantangan di Era Digital. *Journal of Authentic Research*, 4(1), 338–350.
34. Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
35. Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356-367. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>
36. Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. *Decision Sciences*, 39(2), 273-315. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.2008.00192.x>
37. World Bank. (2025). *THE GLOBAL FINDEX DATABASE 2025*.
38. Yulandari, K. P., & Astuti, R. D. (2023). Pengaruh literasi keuangan dan fintech payment terhadap inklusi keuangan pada masyarakat di Indonesia. *JER Jurnal Ekonomi Regional*, 15(2), 10–20.
39. Yuliyanti, P., & Pramesti, D. A. (2021). Tercapainya inklusi keuangan: Mampukah dengan literasi keuangan dan financial technology? (Studi kasus: Masyarakat Kota Magelang, Jawa Tengah). *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 29(2), 57–70. <https://doi.org/10.32477/jkb.v29i2.292>